



Menciptakan Equilibrium: Harmonisasi Kekuasaan Konstruktif Vs Otoritarianisme Politik dalam Etika Kristen

Roy Haries Ifraldo Tambun¹

¹ Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematangsiantar. E-mail: roytambun521@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted: September 29, 2024

Review: November 06, 2024

Accepted: December 03, 2024

Published: December 28, 2024

KEYWORDS

Equilibrium, Christian ethic, Constructive power; politics, Political Authoritarianism.

CORRESPONDENCE

Phone: 0823-6377-6711

E-mail: roytambun521@gmail.com

ABSTRACT

Power and politics in Indonesia are closely interlinked, where the abuse of power has become a highly significant and concerning phenomenon. This phenomenon not only impedes the nation's social and economic progress, but also creates various forms of systemic injustice and erodes public trust in government institutions. Through a qualitative research methodology, this study examines a range of literature sources to understand the causal factors and impacts of power abuse. The findings reveal a strong correlation between power abuse and the practices of corruption, collusion, and weak law enforcement, as well as the influence of individual and social environmental factors. The research recommends the need for more effective policy reformulation and the application of Christian ethics in the political sphere. By upholding ethical principles, it is hoped that power can be used to serve the public fairly, create a conducive environment for sustainable development, and provide new insights for policymakers in addressing this issue.

ABSTRAK

Kekuasaan Konstruktif dan otoritarianisme politik di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan signifikan, menciptakan fenomena yang meresahkan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam konteks politik Indonesia. Melalui metodologi penelitian kualitatif, berbagai sumber literatur dianalisis untuk memahami dampak negatif dari kekuasaan yang tidak terkendali, termasuk munculnya praktik korupsi, kolusi, serta lemahnya penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara penyalahgunaan kekuasaan dengan ketidakadilan sosial dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih efektif dan penerapan etika Kristen dalam praktik politik. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika, diharapkan kekuasaan dapat digunakan untuk melayani masyarakat secara adil, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, serta memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan dalam menangani masalah otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

Kata Kunci: Equilibrium, Etika Kristen, Kekuasaan Konstruktif, Politik, Otoritarianisme Politik.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia merupakan masalah serius yang menghambat kemajuan dan menciptakan ketidakadilan. Hal ini erat kaitannya dengan lemahnya sistem checks and balances, kecenderungan

otoritarianisme, dan konsentrasi kekuasaan pada satu pihak atau lembaga. Pada masa Orde Baru, misalnya, kekuasaan terkonsentrasi pada eksekutif, memudahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, lemahnya pengawasan antar lembaga dan budaya politik otoritarian turut memperburuk

masalah ini. Penegakan hukum yang lemah juga menciptakan budaya impunitas, memperburuk ketidakadilan dan kesulitan dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat sistem *checks and balances* antar lembaga negara, mendorong partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Reformasi birokrasi yang fokus pada profesionalisme aparatur negara dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu juga menjadi kunci. Pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya juga sangat penting. Dengan komitmen dari semua pihak, diharapkan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dan Indonesia dapat menuju sistem politik yang lebih demokratis dan transparan.¹

Di Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan sering kali terkait dengan praktik korupsi, kolusi, dan lemahnya penegakan hukum, di mana pejabat publik sering memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, moralitas yang rendah, dan tekanan ekonomi-politik memperburuk situasi ini, menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan kerugian ekonomi negara.² Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab penyalahgunaan kekuasaan dan mengkaji solusi yang lebih efektif, dengan fokus pada peran etika Kristen dalam politik dan kekuasaan.³

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan sering kali terkait dengan korupsi dan kolusi. Namun, terdapat celah dalam pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi perilaku pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk menantang pandangan tersebut dengan mengeksplorasi

lebih dalam hubungan antara struktur kekuasaan dan budaya organisasi pemerintah.⁴ Berdasarkan hipotesis penulis, ada hubungan signifikan antara lemahnya penegakan hukum dan meningkatnya kasus penyalahgunaan kekuasaan. Melalui metodologi penelitian kualitatif yang bersumber pada literatur, diharapkan dapat ditemukan pola-pola baru serta rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk menangani masalah ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk merekonstruksi realitas terkait dengan fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang semakin marak pada masa kini.⁵ Melalui studi kepustakaan dan analisis literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam literatur yang ada. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks di mana penyalahgunaan kekuasaan terjadi.⁶ Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu terkait topik ini.⁷

Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana peneliti merumuskan pertanyaan penelitian dan merencanakan metode pengumpulan data. Tahap kedua melibatkan pengumpulan data, yang mencakup pencarian kata kunci, penyaringan judul dan abstrak, serta penilaian terhadap relevansi dan kualitas studi yang ditemukan. Setelah data terkumpul, tahap analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan tematik untuk mengevaluasi data yang telah diperoleh. Hasil dari analisis ini kemudian disintesis dan disajikan dalam bentuk laporan yang komprehensif dan berimbang,

¹ Yohanes Krismantyo Susanta, "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta," *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (Oktober 2019): 24–26.

² Raden Imam Al Hafis and Moris Adidi Yogia, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 82.

³ Al Hafis and Yogia, 81.

⁴ Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, and Lukman, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif

Hukum Administrasi Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (2022): 353–54.

⁵ Djaman Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabetika, 2010), 22.

⁶ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

⁷ Fadjar Tri Sakti et al., "Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dialektika* 21, no. 2 (2023): 149.

dengan tujuan memberikan pemahaman yang holistik tentang penyalahgunaan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Otoritarianisme dan Kekuasaan Konstruktif

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani kuno '*polis*' yang berarti kota. Pada masa itu, politik dipahami sebagai upaya untuk membangun, mengatur, dan menciptakan kesejahteraan bagi warga di suatu wilayah atau kota tertentu.⁸ Dengan demikian, pada hakikatnya politik merupakan sesuatu yang positif dan bertujuan baik, yaitu mewujudkan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Sayangnya, politik kerap disalahgunakan oleh sebagian orang yang menjalankannya dengan cara-cara yang menyimpang dari tujuan mulia tersebut.⁹

Otoritarianisme adalah pemerintahan yang memusatkan kekuasaan pada satu individu atau kelompok kecil, sering kali mengabaikan demokrasi dan kebebasan sipil. Penguasa menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, membatasi pluralisme politik, dan menekan oposisi untuk melanggengkan kekuasaan. Otoritarianisme dapat berbentuk rezim militer, partai tunggal, atau pemerintahan yang dipimpin pemimpin karismatik, dengan tujuan mengurangi partisipasi politik masyarakat dan mengabaikan akuntabilitas.¹⁰

Istilah "otoritarianisme" berasal dari kata "*authority*," yang menunjukkan bahwa sistem ini berpegang pada kekuasaan dan kewibawaan tanpa memberikan ruang bagi kebebasan individu.¹¹ Dalam praktiknya, otoritarianisme seringkali berlawanan dengan nilai-nilai demokratis seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, hak asasi manusia, serta kebebasan berbicara. Meskipun dalam beberapa kasus otoritarianisme dapat menciptakan stabilitas

politik dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dampak jangka panjangnya sering kali merugikan masyarakat dengan menghilangkan hak-hak dasar dan menciptakan ketidakadilan sosial. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai politik. Miriam Budiarjo menyebutnya sebagai disiplin ilmu yang baru berkembang pada abad ke-19¹², sementara William Ebenstein mengklaim bahwa politik adalah ilmu pengetahuan tertua yang sangat penting untuk dipelajari.¹³ Menurut Ebenstein, pemikiran sistematis dan penelitian kreatif dari para ilmuwan Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan lainnya telah memberikan kontribusi besar dalam perumusan konsep dan teori politik di dunia. Bahkan sebelum itu, konsep politik telah disinggung dalam Alkitab, meski dengan pemaknaan yang berbeda dengan konteks saat ini.¹⁴ Injil Yohanes dianggap sebagai injil yang banyak menyoroti isu-isu politik, dipengaruhi oleh situasi penulisannya yang erat kaitannya dengan lingkar filsafat pada masa itu. Jadi, politik bukanlah fenomena baru yang muncul belakangan ini, melainkan telah ada sejak ribuan tahun lalu di peradaban-peradaban kuno.

Meski demikian, praktik politik di masa lalu tentu berbeda dengan yang terjadi saat ini. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial budaya turut membentuk wajah baru politik modern. Namun esensinya tetap sama, yaitu upaya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama.¹⁵ Politik merupakan sebuah wadah untuk membentuk karakter masyarakat yang terkandung dalam pengambilan keputusan berbangsa dan bernegara. Setiap orang yang menjadi politisi bukanlah karena keinginan untuk berkuasa atau menguasai orang lain, namun membantu kehidupan banyak orang dengan memberikan perhatian lebih berupa tanggungjawab akan banyak orang. Magnis Suseno mengatakan bahwa etika politik harus menyangkut persoalan

⁸ Saut Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 22.

⁹ Ferdinand Samuel Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (April 2017): 3–4.

¹⁰ Budi Rajab, "Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi Dan Politik, Dan Demokrasi Formal Masa Reformasi," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (2022): 60–61.

¹¹ Yusa Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru," *Jurnal Adhikari* 1, no. 3 (2022): 153–55.

¹² Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia*, 19.

¹³ Sirait, 19.

¹⁴ Oscar Culman, *The State in the New Testament* (New York: Charles Scribner's Sons, 1995), 21–22.

¹⁵ Djyoys Anake Rantung, "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia," *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017): 58–59.

hukum, kekuasaan, dan penilaian kritis terhadap legitimasi yang diajukan.¹⁶

Kata "kekuasaan" berasal dari kata dasar "kuasa" yang bermakna memiliki kekuatan atau tenaga untuk berbuat sesuatu. Kata "kuasa" ini sendiri berasal dari bahasa Sansekerta "kwāsā" yang artinya bernapas. Kekuasaan merupakan sebuah konsep penting dalam ranah politik yang berkaitan dengan kemampuan dan wewenang untuk mengatur, mempengaruhi, dan mengendalikan kehidupan orang lain.¹⁷ Dalam pandangan etika Kristen, kekuasaan seharusnya dijalankan dengan mengacu pada teladan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kedamaian. Sebagai seorang pemimpin agama, Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kekuasaan digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kebaikan hati.¹⁸

Kekuasaan konstruktif adalah istilah yang merujuk pada kekuasaan yang digunakan untuk membangun, mengembangkan, dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, kekuasaan konstruktif berfokus pada pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dengan cara yang transparan dan akuntabel. Kekuasaan ini berbeda dari kekuasaan destruktif, yang cenderung merugikan atau menindas. Kekuasaan konstruktif mencakup kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif, mendorong kolaborasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga melibatkan tanggung jawab moral untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, kekuasaan konstruktif dapat terlihat dalam kebijakan publik yang inklusif, program-program sosial yang memberdayakan komunitas, serta upaya untuk memperkuat institusi demokratis. Dengan demikian, kekuasaan konstruktif berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.¹⁹

¹⁶ R.Z. Leirissa, *Kewarganegaraan Yang Bertanggungjawab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 39.

¹⁷ Zakaria J. Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 217.

¹⁸ Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia*, 40.

¹⁹ M. Burhanuddin Ubaidillah, "Dialog Konstruktif Inisiatif Internasionalisme HAM Dalam Menembus

Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan beragam keyakinan, tidak dapat menghindar dari pengaruh agama dalam dunia politik. Oleh karena itu, pemimpin agama memiliki peran signifikan dalam mendukung proses politik di Indonesia. Mereka diharapkan dapat memberikan pencerahan dan arahan agar kekuasaan dijalankan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Kekuasaan ibarat kepingan logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, yang satu dapat ke arah positif, dan yang satu lagi bisa menjadi negatif, semuanya itu tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Jika kekuasaan dimanfaatkan dengan tujuan mulia untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, maka kekuasaan tersebut menjadi sebuah berkah. Namun, jika kekuasaan disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi semata, seperti melakukan tindak pidana gratifikasi, pencucian uang, atau korupsi, maka kekuasaan tersebut menjadi boomerang yang berbahaya dan merugikan banyak pihak.²⁰

Kegiatan perekonomian juga kerap menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan jahat, bahkan menyalahgunakan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, jelas bahwa Allah tidak pernah menghendaki hal tersebut untuk dilakukan oleh manusia.²¹ Dengan demikian, kekuasaan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kekuasaan dapat menjadi alat untuk mendidik dan membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun di sisi lain, kekuasaan juga dapat menjadi sumber kerusakan jika digunakan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemegang kekuasaan untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kebaikan hati, seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus.²²

B. Landasan Biblis Politik dan Kekuasaan

Berdasarkan Yeremia 29:7, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah

Sacred Veil Kedaulatan Negara," *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (July 2020): 68-70.

²⁰ Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia*, 41.

²¹ M. Douglas Meeks, *God The Economist: The Doctrine Of God And Political Economy* (Minneapolis: Fortress Press, 1989), 2.

²² Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia*, 70.

kesejahteraanmu." Konsep kesejahteraan dalam politik seharusnya tidak hanya dipahami secara sempit sebagai kemakmuran ekonomi semata, tetapi juga mencakup keadilan sosial, perdamaian, dan terwujudnya tatanan kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama para pemimpin dan pengambil kebijakan. Sayangnya, realita politik masa kini seringkali jauh dari prinsip ini.

Kepentingan pribadi atau kelompok tertentu kerap mengalahkan kepentingan publik yang lebih besar. Praktik-praktik seperti politik uang, korupsi, dan perebutan kekuasaan telah mencederai semangat politik yang sejati. Gereja juga berperan penting dalam mempromosikan etika politik yang benar ini. Gereja harus menjadi suara kenabian yang mengkritik praktik-praktik politik yang menyimpang, sekaligus mengutamakan pembentukan tata kelola yang benar, bersih, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.²³

Dalam Perjanjian Baru, pemahaman akan politik tidak jauh berbeda dengan di Perjanjian Lama. Keduanya memiliki titik fokus yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dalam Perjanjian Baru, hal itu lebih dispesifikan pada konsep eirene, yaitu menekankan pada perdamaian yang ada di seluruh masyarakat. Perdamaian yang dimaksud bukan sekadar bebas dari konflik fisik, melainkan lebih luas mencakup keadilan, kesejahteraan, dan terwujudnya kehidupan yang utuh serta berkualitas bagi semua orang. Inilah inti dari politik Kristen menurut ajaran Perjanjian Baru. Dalam konteks ini, otoritas pemerintah dalam Roma 13:1-7 dipandang sebagai wakil Allah untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Ketaatan kepada pemerintah dianjurkan selama kebijakan yang diambil sejalan dengan kehendak Allah. Namun, jika bertentangan, ketaatan kepada Allah harus diutamakan.²⁴

Ketaatan kepada otoritas dalam Roma 13 dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan damai yang bebas dari anarki dan kekacauan. Sebab, hanya dengan situasi damai, keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan.²⁵ Dengan demikian, politik Kristen dalam Perjanjian Baru mengandung dua dimensi yang saling terkait.

Pertama, dimensi spiritual untuk hidup benar dan berdamai dengan Allah melalui karya Kristus. Kedua, dimensi sosial dengan memperjuangkan kehidupan damai, adil, dan sejahtera bagi semua orang di dunia. Kedua dimensi ini saling berkaitan erat.

Kedamaian sejati bukan hanya bebas konflik lahiriah, tetapi juga mencakup rekonsiliasi bagi sesama manusia dengan Allah dan sesama. Begitu pula, keadilan dan kesejahteraan masyarakat mustahil terwujud jika hati nurani manusia tidak dimampukan untuk hidup benar dan saling mengasihi.²⁶ Oleh karena itu, politik Kristen dalam Perjanjian Baru memiliki cakupan yang holistik, tidak terbatas pada kehidupan bernegara saja, tetapi melingkupi seluruh totalitas kehidupan manusia sebagai makhluk rohani-jasmani yang membutuhkan damai sejahtera sejati. Dalam konteks ini, gereja memainkan peran penting. Di satu sisi, gereja berperan mentransformasi kehidupan rohani jemaat melalui Injil damai sejahtera. Di sisi lain, gereja terpanggil menjadi agen damai di tengah masyarakat dengan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam Markus 10:42-45, Yesus secara gamblang menentang konsep kekuasaan sebagai sarana untuk menguasai dan mendominasi orang lain. Ajaran ini merupakan koreksi terhadap cara pandang dunia tentang kekuasaan saat itu.

C. Pendapat Para Ahli Terhadap Kekuasaan

Pemikiran Dale Yoder tentang hubungan politik dan kekuasaan dapat diperluas dalam konteks *equilibrium* kekuasaan dan politik melalui perspektif yang lebih mendalam. Dalam pandangan Yoder, keseimbangan dalam hubungan industrial merupakan kondisi ideal yang perlu terus diupayakan melalui berbagai mekanisme organisasional. Keseimbangan ini tidak hanya mencakup aspek formal organisasi, tetapi juga melibatkan dinamika informal yang terjadi dalam interaksi sehari-hari antara berbagai pemangku kepentingan.²⁷

Equilibrium dalam konteks kekuasaan organisasi, sebagaimana dapat dikembangkan dari pemikiran Yoder, merupakan kondisi di mana terjadi distribusi kekuasaan yang proporsional antara manajemen dan pekerja. Kondisi *equilibrium* ini tidak bersifat statis,

²³ Sirait, 22.

²⁴ Sirait, 127.

²⁵ Sirait, 127-28.

²⁶ Sirait, 128.

²⁷ John Howard Yoder, *The Politics Of Jesus* (Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1994), 23-24.

melainkan dinamis dan terus bergerak mencari titik keseimbangan baru seiring dengan perubahan kondisi internal dan eksternal organisasi. Keseimbangan kekuasaan ini tercermin dalam berbagai aspek organisasi, mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasi kebijakan.²⁸

Dalam perspektif politik organisasi, *equilibrium* yang dibangun atas dasar pemikiran Yoder mensyaratkan adanya sistem checks and balances yang efektif. Sistem ini memungkinkan terjadinya proses negosiasi dan tawar-menawar yang sehat antara berbagai kepentingan dalam organisasi. Politik dalam konteks ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai mekanisme alamiah untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan.

Keseimbangan kekuasaan dalam organisasi, sebagaimana dapat dikembangkan dari pemikiran Yoder, juga melibatkan peran aktif dari berbagai stakeholder eksternal. Pemerintah sebagai regulator, serikat pekerja sebagai representasi kepentingan pekerja, dan pasar tenaga kerja sebagai konteks makro, semuanya berperan dalam membentuk dan mempengaruhi *equilibrium* kekuasaan dalam organisasi. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam upaya mencapai dan mempertahankan keseimbangan.²⁹

Dalam konteks modern, *equilibrium* kekuasaan yang dibangun atas dasar pemikiran Yoder harus mampu mengakomodasi berbagai tantangan kontemporer. Globalisasi, perubahan teknologi, dan tuntutan sustainability menciptakan tekanan baru terhadap keseimbangan kekuasaan yang ada. Organisasi perlu mengembangkan mekanisme adaptif untuk mempertahankan *equilibrium* di tengah perubahan yang cepat dan tidak pasti. Keberhasilan dalam mencapai dan mempertahankan *equilibrium* kekuasaan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun dan mengelola sistem hubungan industrial yang efektif. Sistem ini harus mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak sambil tetap menjaga produktivitas dan keberlanjutan organisasi. Manajemen konflik

yang efektif dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam proses ini. *Equilibrium* kekuasaan dalam organisasi juga memiliki dimensi temporal yang penting. Dalam jangka pendek, organisasi perlu mampu mengelola krisis dan konflik yang muncul tanpa mengganggu keseimbangan sistem secara keseluruhan. Sementara dalam jangka panjang, fokus diberikan pada pengembangan sistem dan kapasitas yang mendukung terciptanya *equilibrium* yang berkelanjutan.³⁰

Pemahaman mendalam tentang hubungan antara pemikiran Yoder dengan *equilibrium* kekuasaan dan politik memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan praktik manajemen yang lebih efektif. Organisasi yang mampu mencapai dan mempertahankan *equilibrium* kekuasaan akan lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan, sambil tetap menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan.³¹ Senada dengan yang dikatakan oleh Dale Yoder, William Stringfellow juga menyatakan dalam bukunya "An Ethic for Christians and Other Aliens in a Strange Land", Stringfellow menegaskan bahwa kekuasaan dalam pandangan Kristen harus digunakan sebagai kekuatan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, bukan justru untuk melestarikan kedua hal tersebut.³² Stringfellow berpendapat bahwa kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh manusia untuk menindas dan mengekang sesama.³³ Kekuasaan duniawi cenderung digunakan untuk mempertahankan status yang menguntungkan segelintir pihak saja, sementara mengorbankan dan meminggirkan yang lemah. Namun dalam terang iman Kristen, kekuasaan seharusnya tidak menjadi alat penindasan, melainkan justru sebagai sarana untuk melawan dan mengakhiri segala bentuk ketidakadilan yang ada. Yesus sendiri menggunakan kekuasaan-Nya untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, penyakit, dan penindasan struktur sosial yang ada. Dengan bersandar pada teladan Kristus, orang Kristen dipanggil untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai upaya melawan segala bentuk penindasan, baik penindasan fisik, ekonomi, politik, maupun kultural. Kekuasaan menjadi wahana untuk

²⁸ Yoder, 24.

²⁹ Yoder, 25.

³⁰ Yoder, 25.

³¹ Yoder, 24.

³² William Stringfellow, *An Ethic for Christians and Other Aliens in a Strange Land* (Waco: Word Books Publisher, 1973), 28.

³³ Stringfellow, 28.

membela dan memberdayakan kaum tertindas agar memperoleh keadilan dan kebebasan sejati.³⁴

Pemikiran Eka Darmaputra tentang etika politik Kristiani membawa dimensi penting dalam memahami *equilibrium* kekuasaan. Dalam bukunya "Pembaruan Etika Politik", Darmaputra menekankan bahwa kekuasaan politik harus senantiasa diimbangi dengan nilai-nilai etis yang bersumber dari ajaran Kristiani. Keseimbangan ini menjadi krusial dalam menciptakan tata kelola politik yang sehat dan bermartabat. Prinsip anti-korupsi yang digariskan Darmaputra menjadi fondasi penting dalam mencapai *equilibrium* kekuasaan. Ketika korupsi merajalela, keseimbangan kekuasaan akan terganggu karena terciptanya konsentrasi kekayaan dan pengaruh yang tidak sehat pada segelintir elite. Korupsi tidak hanya mencederai integritas moral pemerintahan, tetapi juga menghancurkan sistem checks and balances yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan politik.³⁵

Dalam konteks *equilibrium* politik, perjuangan anti-korupsi menjadi instrumen penting untuk mencegah abuse of power. Ketika kekuasaan politik dijalankan dengan integritas, maka tercipta keseimbangan yang sehat antara kepentingan publik dan kewenangan pemerintah. Politisi Kristiani dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam menegakkan prinsip anti-korupsi ini, bukan hanya dalam tataran retorika tetapi juga dalam praksis politik sehari-hari. Darmaputra memahami bahwa *equilibrium* kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari penegakan keadilan. Ketika keadilan ditegakkan, maka tercipta keseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Sebaliknya, ketidakadilan sistemik akan menciptakan ketimpangan kekuasaan yang berbahaya bagi stabilitas sosial-politik. Prinsip keadilan ini menjadi kompas moral yang mengarahkan penggunaan kekuasaan politik.³⁶

Komitmen untuk membela kaum miskin dan tertindas, sebagaimana ditekankan Darmaputra, menjadi aspek krusial dalam menjaga *equilibrium* kekuasaan. Ketika kekuasaan politik berpihak pada yang lemah, maka tercipta mekanisme penyeimbang terhadap dominasi kelompok elit. Pembelaan

terhadap kaum marginal ini bukan sekadar aksi karitatif, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih adil. Dalam perspektif *equilibrium*, ketiga prinsip yang digariskan Darmaputra anti korupsi, keadilan, dan pembelaan kaum tertindas membentuk sistem checks and balances yang saling menguatkan. Anti-korupsi menjamin integritas sistem politik, keadilan memastikan distribusi kekuasaan yang seimbang, dan pembelaan kaum tertindas mencegah abuse of power terhadap kelompok rentan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam realitas politik kontemporer menuntut kesadaran akan kompleksitas dinamika kekuasaan. Politisi Kristiani harus mampu bernavigasi dalam tension antara idealisme etis dan pragmatisme politik, tanpa mengorbankan integritas moral. Keseimbangan ini mensyaratkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan politik dan keberanian moral untuk menegakkan prinsip-prinsip etis.³⁷

Pemikiran Darmaputra menegaskan bahwa *equilibrium* kekuasaan bukan sekadar konsep teoretis, melainkan panggilan moral yang harus diwujudkan dalam praksis politik. Etika politik Kristiani yang ia gariskan memberikan kerangka kerja untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, antara otoritas dan akuntabilitas, serta antara kepentingan politik dan kebaikan bersama. Dengan demikian, kontribusi pemikiran Darmaputra menjadi sangat relevan dalam upaya menciptakan *equilibrium* kekuasaan yang sehat. Prinsip-prinsip yang ia kemukakan tidak hanya menjadi panduan etis bagi politisi Kristiani, tetapi juga menawarkan perspektif penting dalam memahami dan mengelola dinamika kekuasaan politik secara lebih bermartabat dan bertanggung jawab.³⁸

Kedua, menjunjung keadilan. Keadilan adalah nilai sentral dalam Kekristenan karena mencerminkan karakter Allah sendiri. Dalam konteks politik, keadilan berarti kebijakan dan tindakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan kelompok tertentu.³⁹ Ketiga, membela kaum miskin dan tertindas. Yesus sangat berpihak kepada orang-orang lemah,

³⁴ Stringfellow, 28.

³⁵ Darmaputra, 29.

³⁶ Darmaputra, 30.

³⁷ Darmaputra, 29–30.

³⁸ Darmaputra, 30.

³⁹ Darmaputra, 30.

miskin, dan terpinggirkan. Maka seorang politisi Kristen harus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum marginal, memberdayakan yang lemah, dan melindungi yang terzalimi. Keberpihakan kepada kaum miskin inilah wujud nyata dari kasih Kristus.⁴⁰

D. Etika Kristen dalam Pusaran Politik

Etika politik merupakan aspek penting yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep "polis" atau komunitas warga mengacu pada tatanan kehidupan bersama yang didasarkan pada kepentingan bersama dan kebaikan publik.⁴¹ Menjadi manusia berarti menjadi bagian dari komunitas sipil.⁴² Meskipun konotasi politik modern sering dikaitkan dengan perebutan kekuasaan, pada dasarnya politik adalah upaya untuk menentukan apa yang harus dilakukan komunitas demi mencapai tujuan bersama. Namun, orang Kristen tidak boleh menggunakan taktik yang tidak etis dalam berpolitik.

Dalam perspektif Kristen, etika politik tidak terlepas dari prinsip-prinsip ajaran agama. Gereja sebagai komunitas umat beriman memiliki struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai Kristen seperti kasih, keadilan, dan pelayanan.⁴³ Politik gereja menjadi sarana untuk mewujudkan visi dan misi pelayanan gereja kepada umat dan masyarakat luas.⁴⁴ Gereja berperan sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua orang, termasuk kaum miskin dan tertindas.⁴⁵

Etika politik Kristen juga menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Pemimpin gereja diharapkan menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Kristen dan melayani sesama dengan rendah hati.⁴⁶ Proses pengambilan keputusan dalam gereja seharusnya didasarkan pada dialog,

musyawarah, dan pencarian kehendak Tuhan bersama. Namun, politik gereja tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Perbedaan pandangan dan kepentingan sering muncul dalam komunitas gereja, sehingga diperlukan kearifan dan kebijaksanaan untuk mengelola konflik dan mencapai kesepakatan. Gereja juga harus menjaga independensi dan integritas spiritual, serta tidak terjebak dalam permainan politik kekuasaan semata.⁴⁷ Dalam hal ini, Yesus tidak pernah menggunakan kekuasaan-Nya bukan untuk menindas atau menekan, melainkan untuk melayani, membebaskan, dan mendamaikan manusia dengan Allah. Inilah keteladanan yang harus diikuti oleh orang Kristen, terutama dalam ranah politik dan penggunaan kekuasaan. Seorang politisi atau pemimpin Kristen harus menjalankan kekuasaannya dengan berlandaskan nilai-nilai kasih, damai, dan keadilan sebagaimana diajarkan Kristus. Kekuasaan bukan untuk mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan untuk memberdayakan dan mendidik rakyat agar hidup dengan penuh tanggung jawab dan kebaikan bersama.⁴⁸

Dalam konteks Indonesia yang majemuk dengan beragam agama, faktor keagamaan tentu memengaruhi dinamika politik di tanah air. Pemimpin agama, termasuk tokoh-tokoh Kristen, memiliki peran penting dalam membentuk etika dan moralitas para politisi serta pemimpin bangsa. Ajaran-ajaran Kristen tentang penggunaan kekuasaan yang benar harus menjadi contoh yang baik bagi setiap orang. Pemimpin agama Kristen perlu terus menyuarakan etika kekuasaan yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan perdamaian sebagaimana diajarkan Yesus Kristus. Mereka harus memberikan keteladanan dalam menggunakan kekuasaan untuk melayani

⁴⁰ Darmaputra, 31.

⁴¹ Grets Janialdi Apner Siregar, "Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia," *Diegesis: Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2021): 4-6.

⁴² Cox Harvey, *Secular City* (New York: The Macmillan Company, 1966), 95.

⁴³ Leniwan Darmawati Gea, Deni, and Sulianus Susanto, "Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Kepemimpinan Kristen Dan Implikasinya Bagi Pemimpin Kristen Masa Kini," *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 1 (June 2022): 61-62.

⁴⁴ Adolf Bastian Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia," *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018): 3-4.

⁴⁵ J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives On Politics* (Kentucky: Westminister John Knox Press, 1988), 14.

⁴⁶ Deni, "Menyikapi Dilema Kekuasaan Dalam Kepemimpinan Kristen," *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 2 (Desember 2022): 110-11.

⁴⁷ Wogaman, *Christian Perspectives On Politics*, 14.

⁴⁸ Wogaman, 14.

dan memberdayakan, bukan untuk menguasai atau menekan.⁴⁹

Dengan demikian, pengaruh agama Kristen dalam politik di Indonesia dapat menjadi kekuatan positif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan pro-rakyat. Kekuasaan yang sejalan dengan teladan Yesus akan membawa berkat bagi orang lain dan menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kekuasaan dan politik dalam etika Kristen.

Dalam menciptakan *equilibrium* antara kekuasaan dan politik dalam etika Kristen, terdapat beberapa aspek penting yang diperhatikan,⁵⁰ seperti Penggunaan Kekuasaan yang Berorientasi pada Pelayanan Yesus memberikan teladan kepada pengikut-Nya bahwa kekuasaan bukanlah untuk menindas atau memaksakan kehendak, melainkan untuk melayani dan membebaskan manusia. Pemimpin Kristen harus menjalankan kekuasaannya dengan landasan kasih, damai, dan keadilan sesuai ajaran Kristus. Tidak Prinsip Kerajaan Allah sebagai Panduan Etik. Dalam hal ini, Konsep "Kerajaan Allah" menjadi prinsip penting dalam etika politik Kristen. Gereja berperan menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian, di dalam dinamika politik dan kekuasaan. Kerajaan Allah menekankan adanya keberpihakan kepada kaum-kaum lemah serta yang termarginalkan, sehingga dengan menghadirkan kerajaan Allah dalam kekuasaan dan politik, maka setiap orang Kristen telah memberikan bentuk keberpihakannya kepada orang-orang yang tertindas dan termarginalkan.

Dalam menjaga kekuasaan tersebut, setiap orang harus memiliki sikap Integritas dan Akuntabilitas dalam Kepemimpinan, di mana Pemimpin gereja harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Kristen, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada dialog, musyawarah, dan pencarian kehendak Tuhan bersama. Gereja juga

harus bijaksana dalam mengelola konflik dan perbedaan pandangan yang muncul dalam komunitas. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas spiritual gereja. Oleh

karena itu, pemimpin agama Kristen memiliki pengaruh penting dalam membentuk etika dan moralitas para politisi serta pemimpin bangsa. Mereka harus terus menyuarakan etika kekuasaan yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang harmonis antara kekuasaan dan politik dalam etika Kristen, sehingga dapat menjadi kekuatan positif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan pro-rakyat di Indonesia.⁵¹

E. Sikap Etis Kekristenan dalam Menanggapi Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu bagian terpenting dari etika Kristen tentang kekuasaan dan politik menggarisbawahi bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani orang lain, menegakkan keadilan, dan memuliakan Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini berdasarkan teladan Yesus yang menggunakan kekuasaan-Nya untuk melayani, bukan untuk menguasai.⁵² Dalam Markus 10:42-45, Yesus menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan, bukan penguasa. Kekuasaan diberikan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Yesus juga menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan.⁵³

Sikap etis Kristen menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Gereja harus menjadi contoh dalam menggunakan kekuasaan untuk melayani, bukan untuk menguasai. Gereja juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai politik Kristen yang murni, seperti kasih, integritas, dan keadilan. Namun, realitasnya masih sering ditemukan penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi di dalam gereja. Misalnya, menerima sumbangan dengan syarat politik yang tidak etis. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Yesus.

Harmonisasi kekuasaan dan politik dalam etika Kristen, gereja harus kembali pada ajaran Kristus yang menekankan kasih, integritas, dan keadilan. Gereja harus menjadi contoh dalam menggunakan kekuasaan untuk melayani, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

⁴⁹ H. Richard Niebuhr, *Christ and Culture* (New York: Harper and Row, 1975), 11.

⁵⁰ Niebuhr, 14.

⁵¹ Niebuhr, 13.

⁵² Martje Panekenan, "Pola Kepemimpinan Kristen Menurut Injil Yohanes 13: 1-20," *Jurnal Teologi Educatio Christi* 1, no. 1 (January 2020): 41-42.

⁵³ Yoder, *The Politics Of Jesus*, 29.

Hanya dengan cara ini, gereja dapat memainkan peran penting dalam pembentukan kehidupan yang adil dan damai. Inti dari harmonisasi ini adalah memahami bahwa kekuasaan dan politik harus digunakan sebagai sarana untuk melayani orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini sejalan dengan teladan Yesus yang menggunakan kekuasaan-Nya untuk melayani dan membebaskan manusia.⁵⁴

Dalam konteks *equilibrium* kekuasaan dan politik, etika Kristiani menawarkan paradigma unik yang menyeimbangkan antara kekuasaan sebagai pelayanan dan realitas politik praktis. Keseimbangan ini menjadi krusial ketika pemahaman tentang kekuasaan sebagai sarana pelayanan bersinggungan dengan dinamika politik yang kompleks. *Equilibrium* dalam konteks ini berarti menciptakan keselarasan antara penggunaan kekuasaan politik dan nilai-nilai pelayanan Kristiani. Yesus memberikan teladan bagaimana kekuasaan dapat digunakan tanpa terjebak dalam ekstremitas politik, baik dominasi maupun pengabaian tanggung jawab. Keseimbangan ini tercermin dalam kemampuan untuk menegakkan keadilan sambil tetap mempertahankan sikap pelayanan yang rendah hati.

Dalam ranah politik praktis, *equilibrium* kekuasaan menuntut kebijaksanaan untuk mengelola berbagai kepentingan tanpa mengorbankan prinsip pelayanan. Para pemimpin Kristiani dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan integritas moral sambil bervisualisasi dalam kompleksitas politik. Keseimbangan ini melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan politik yang strategis tanpa mengkompromikan nilai-nilai etis Kristiani. Penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi ketika *equilibrium* ini terganggu ketika kepentingan politik mengalahkan panggilan untuk melayani, atau ketika idealisme pelayanan mengabaikan realitas politik. Etika Kristiani menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan ini melalui komitmen pada kebenaran, keadilan, dan kedulian terhadap kesejahteraan bersama.

Dalam konteks yang lebih luas, *equilibrium* kekuasaan juga mencakup hubungan antara otoritas gerejawi dan politik. Gereja dipanggil

untuk menjadi suara profetis dalam masyarakat tanpa terjebak dalam politik praktis. Keseimbangan ini memungkinkan gereja untuk tetap relevan dalam diskursus politik sambil mempertahankan independensi spiritualnya. Dengan demikian, *equilibrium* kekuasaan dalam perspektif etika Kristiani tidak hanya tentang menghindari ekstremitas, tetapi juga tentang menciptakan sintesis yang dinamis antara pelayanan dan politik. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam realitas politik kontemporer, di mana kekuasaan digunakan bukan untuk mendominasi, melainkan untuk melayani dan mentransformasi masyarakat sesuai dengan teladan Kristus.⁵⁵

Secara eksplisit, Yesus tidak pernah mengajarkan dan menekankan kepentingan jabatan dan kekuasaan, melainkan menekankan pentingnya mengasihi sesama manusia, termasuk mengasihi musuh. Yesus menekankan penegakan Keadilan dan perhatian kepada orang miskin atau terpinggirkan. Saat ini, dengan mulai memudarnya nilai-nilai politik Kristen, gereja menghadapi tantangan besar. Salah satu contoh adalah ketika gereja menerima sumbangan dari calon legislatif tertentu untuk membangun gereja, dengan syarat bahwa jemaat harus memilih calon tersebut dalam pemilihan nanti. Praktik ini jelas bertentangan dengan ajaran Yesus dan nilai-nilai politik Kristen yang murni.⁵⁶

Dalam memulihkan nilai-nilai politik Kristen, gereja harus kembali ke ajaran Kristus yang menekankan kasih, integritas, dan keadilan. Gereja harus menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Gereja memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai politik Kristen yang murni berdasarkan ajaran Yesus.⁵⁷ Melalui tindakan yang dilandasi oleh kasih, keadilan, dan integritas, gereja harus mampu untuk menunjukkan identitas Kristus yang sejati. Dengan terus memperbarui diri dan menjawab tantangan zaman, gereja dapat berperan penting dalam pembentukan kehidupan yang adil dan damai.⁵⁸

⁵⁴ John Locke, *Two Treatises of Government* (USA: Cambridge University, 1970), 97.

⁵⁵ Elbertsor Locher-Scholten, *Etika Yang Berkeping-Keping* (Jakarta: Djambatan, 1996), 237.

⁵⁶ Yoder, *The Politics Of Jesus*, 37.

⁵⁷ Norman L. Geisler, *Christian Ethics: Contemporary Issues and Options* (Michigan: Baker Academic, 1987), 44.

⁵⁸ Geisler, 44-45.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia disebabkan oleh budaya korupsi dan nepotisme, lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta integritas pejabat publik yang rendah. Konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan publik serta kurangnya komitmen untuk melayani masyarakat turut memperburuk masalah ini.

Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat mencakup hambatan dalam pembangunan yang adil, merusak kepercayaan publik, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghalangi tercapainya keadilan dan perdamaian.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, langkah yang perlu diambil meliputi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, serta penguatan pengawasan publik oleh masyarakat sipil dan media. Pendidikan karakter dan integritas pemimpin juga sangat penting, di mana gereja dapat berperan dalam mempromosikan etika politik Kristen yang berlandaskan ajaran Yesus Kristus.

Dalam etika Kristen, kekuasaan harus dijalankan dengan kasih dan integritas, untuk melayani, bukan menindas. Komitmen kuat dari pemimpin dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua.

REFERENSI

- Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogia. "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017).
- Culman, Oscar. *The State in the New Testament*. New York: Charles Scribner's Sons, 1995.
- Darmaputra, Eka. *Pembaruan Etika Politik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Deni. "Menyikapi Dilema Kekuasaan Dalam Kepemimpinan Kristen." *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 2 (Desember 2022).
- Farchan, Yusa. "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru." *Jurnal Adhikari* 1, no. 3 (2022).
- Gea, Leniwan Darmawati, Deni, and Sulianus Susanto. "Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Kepemimpinan Kristen Dan Implikasinya Bagi Pemimpin Kristen Masa Kini." *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 1 (June 2022).
- Geisler, Norman L. *Christian Ethics: Contemporary Issues and Options*. Michigan: Baker Academic, 1987.
- Harvey, Cox. *Secular City*. New York: The Macmillan Company, 1966.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, and Lukman. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (2022).
- Leirissa, R.Z. *Kewarganegaraan Yang Bertanggungjawab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Locher-Scholten, Elbertsor. *Etika Yang Berkeping-Keping*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. USA: Cambridge University, 1970.
- Manafe, Ferdinand Samuel. "Sikap Kristen Dalam Arena Politik." *Missio Ecclae* 6, no. 1 (April 2017).
- Meeks, M. Douglas. *God The Economist: The Doctrine Of God And Political Economy*. Minneapolis: Fortress Press, 1989.
- Ngelow, Zakaria J. "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014).
- Niebuhr, H. Richard. *Christ and Culture*. New York: Harper and Row, 1975.
- Panekenan, Martje. "Pola Kepemimpinan Kristen Menurut Injil Yohanes 13 : 1-20." *Jurnal Teologi Educatio Christi* 1, no. 1 (January 2020).
- Rajab, Budi. "Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi Dan Politik, Dan Demokrasi Formal Masa Reformasi." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (2022).
- Rantung, Djoys Anake. "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan

- Masyarakat Majemuk Di Indonesia.” *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017).
- Sakti, Fadjar Tri, Ardiansyah, Citra Dwi Lestari, and Enan Sumarni. “Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dialektika* 21, no. 2 (2023).
- Satori, Djamaran, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Simamora, Adolf Bastian. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018).
- Sirait, Saut. *Politik Kristen Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Siregar, Greti Janaldi Apner. “Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia.” *Diegesis: Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2021).
- Strauss, Anslem, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Stringfellow, William. *An Ethisch for Christians and Other Aliens in a Strange Land*. Waco: Word Books Publisher, 1973.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta.” *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (Oktober 2019).
- Ubaidillah, M. Burhanuddin. “Dialog Konstruktif Inisiatif Internasionalisme HAM Dalam Menembus Sacred Veil Kedaulatan Negara.” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (July 2020).
- Wogaman, J. Philip. *Christian Perspectives On Politics*. Kentucky: Westminster John Knox Press, 1988.
- Yoder, John Howard. *The Politics Of Jesus*. Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1994.